

TAJUK RENCANA

Cegah Kluster Sekolah, Percepat Vaksinasi Anak

DI TENGAH bergulirnya rencana vaksinasi untuk anak berusia 6 – 11 tahun yang belum selesai pendataannya di DIY, muncul beberapa kasus covid-19 di sekolah. Temuan kasusnya pun terjadi secara sporadis. Pertama ditemukan pada sejumlah siswa yang sekolah di Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul kemudian di Sleman. Bahkan di Sleman 4 SMA dan sebuah SMK harus ditutup kembali. Menyusul penutupan kembali sekolah di Kepanewonan Sedayu, awal bulan ini.

Pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah wabah covid-19 yang masih belum berlalu, memang masih dalam taraf ujicoba, PTM terbatas. Artinya, belum dilaksanakan proses belajar mengajar sehari penuh. Bahkan masih ada sekolah yang belum melaksanakan. Meski demikian Sekretaris Jenderal Kemendikbudistek Suharti pernah mengatakan, sekalipun ada kasus di sekolah, pelaksanaan PTM terbatas tetap dilanjutkan.

Hanya Kemendikbudistek tidak terlalu mengatur pelaksanaannya. Kebijakan PTM terbatas diserahkan sepenuhnya pada daerah. Sehingga penyesuaian terhadap perilaku hidup sehat terus digencarkan bukan hanya pada siswa namun juga pendidik dan tenaga kependidikan. Bukankah kebijakan membuka kembali sekolah dilakukan dengan banyak pertimbangan dan harus memenuhi protokol kesehatan (prokes) ketat?

Menjadi pertanyaan, mengapa masih juga ada pelajar yang terpapar covid-19? Apakah masalahnya karena kesalahan prosedur atau lengah dalam prokes. Dimana dan darimana penularan terjadi?

Menjadi catatan penting ketika evaluasi mengungkap, meski terjadi di semua jenjang pendidikan di seluruh kabupaten/kota, kebanyakan kasus yang muncul adalah dari siswa SMA/SMK. (KR, 27/11) Pada saat bersamaan, telah mencatatkan DIY menjadi provinsi dengan kasus positif harian tertinggi di

Indonesia. Tentu saja ini bukan prestasi yang patut diapresiasi. Bahkan catatan tersebut seakan menampar DIY yang pernah mendapat apresiasi presiden, sebagai provinsi dengan penanganan covid terbaik. Artinya, kini semua pihak harus *saiyeg saeka prayu* untuk tidak lengah, tidak abai prokes meski sekarang DIY pada status PPKM Level 2 dan kondisi nasional sudah melanda.

Penanggulangan wabah harus menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah. Jadi bukan memunculkan kembali ancaman menghentikan PTM, karena yang diperlukan sekarang adalah solusi untuk ke luar dari semua problema tersebut. Bukankah PTM dibuka adalah karena upaya pemerintah mengatasi kesenjangan pendidikan akibat lamanya pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan? Karena diakui atau tidak, PJJ, tetap tak mampu ketinggalan. Bahkan kesenjangan pendidikan kian tampak.

Jangan sampai bangs aini kehilangan satu generasi akibat pandemi. Untuk itu Pemda DIY perlu menyegerakan vaksinasi untuk anak. Bagaimana pun harus dipahami, vaksin adalah 'tameng' yang akan memberikan kekebalan tubuh yang divaksin. Di sisi lain, orang tua tetap harus meningkatkan pengawasan terhadap anak – terlebih yang berusia remaja : SMA/SMK – setelah mereka pulang dari sekolah.

PTM terbatas, harus menjadi pelajaran berharga semua pihak. Dalam pendidikan dan pengasuhan selama 1,5 tahun anak belajar dari rumah, mestinya sudah memahamkan betapa tidak ringan menyiapkan generasi masa depan yang tangguh dan berkualitas. Sebagian besar pendidik mengakui tidak mudah menyiapkan pembelajaran menggunakan teknologi tinggi. Di sisi lain, orang tua menyadari adalah tidak mudah mendampingi proses pembelajaran anak di era yang sudah berganti. □

Belajar dari Krisis Energi Global

Chanel Tri Handoko

fosil akan mencapai masa *sunset* karena sumber daya bahan bakar fosil yang terbatas. Ditambah lagi dengan adanya isu lingkungan yang menghantui akan membuat penggunaan bahan bakar fosil semakin ditinggalkan. Karena itu, pengembangan EBT adalah suatu keniscayaan. Apalagi, negara kita ini mendapat anugerah sumber daya alam yang sangat berlimpah, termasuk sumber daya energi.

Paradigma lama yang mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar fosil lebih murah dibandingkan energi terbarukan, tidak relevan lagi. Pada kenyataannya, biaya pemanfaatan energi terbarukan dapat lebih murah daripada pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Jika kita melihat faktor eksternalitas, terutama biaya pemulihan lingkungan.

Berdasarkan data Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI, total potensi pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 417,8 GW yang meliputi energi surya, air, angin, bioenergi, panas bumi, maupun energi arus laut. Akan tetapi, setidaknya sampai dengan akhir tahun lalu, total pemanfaatan potensi pembangkit listrik tenaga EBT masih sekitar 10,4 GW atau hanya sebesar 2,5% dari total potensi yang ada. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat besarnya potensi pengembangan EBT yang dimiliki Indonesia.

Paradigma lama yang mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar fosil le-

bih murah dibandingkan energi terbarukan, tidak relevan lagi. Pada kenyataannya, biaya pemanfaatan energi terbarukan dapat lebih murah daripada pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Jika kita melihat faktor eksternalitas, terutama biaya pemulihan lingkungan.

Transisi Energi

Hal lain yang harus diperhatikan dalam rencana pengembangan EBT adalah proses transisi energi yang dilakukan secara bertahap. Jangan sampai pergeseran ekstrem dari penggunaan energi fosil ke EBT menyebabkan terjadinya krisis energi karena pasokan dan infrastruktur EBT belum siap. Di Indonesia, pemanfaatan gas bumi masih memegang peranan penting dalam transisi dari energi fosil ke EBT. Lantaran emisi karbon relatif lebih sedikit dibandingkan minyak bumi dan batubara.

Apapun kebijakan pengelolaan energi yang akan diambil Pemerintah tidak boleh lepas dari pertimbangan *energy trilemma* : ketahanan energi, keadilan energi, dan kelestarian lingkungan. Penyediaan energi yang berkelanjutan merupakan perwujudan dari pembangunan ketahanan iklim serta harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. □

** Dr Chanel Tri Handoko, Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengis subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

 pikiranpembaca@gmail.com  0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Hari Tanpa Belanja

BELANJA merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun kebutuhan yang bersifat mewah. Menyinggung mengenai belanja, perempuan selalu identik dengan kegiatan belanja, tapi laki-laki terkadang juga memiliki hobi serupa. Sebenarnya tujuan utama belanja tidak hanya memenuhi kebutuhan, bisa juga digunakan sebagai sarana refreshing. Belanja merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan, namun akan menjadi sangat fenomenal apabila hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dengan membeli barang-barang yang sesungguhnya tidak diperlukan.

Pandemi Covid-19 menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Seperti halnya saat berbelanja di masa pandemi, kita harus mampu mengelola keuangan agar lebih efektif, yakni kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Terkadang kita malah mengalokasikan dana yang lebih banyak bukan pada kebutuhan tapi keinginan. Padahal banyak keinginan kita yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Selain dituntut untuk menghemat, kita juga dituntut selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak meski dalam keadaan berbelanja. Hal tersebut juga berlaku bagi kita yang melakukan belanja secara online, ketika akan mengambil item-item yang telah dibeli guna mencegah penyebaran Covid-19.

Menurut saya, belanja dengan mendatangi lokasinya langsung tidak apa-apa, asalkan kita mematuhi protokol kesehatan. Tapi tidak perlu berlebihan dalam berbelanja, lebih baik utamakan kebutuhan daripada keinginan yang berkedok reward, namun pada akhirnya hal tersebut hanyalah gairah belanja yang tak berguna. Di masa pandemi seperti ini, lebih baik dana yang sebelumnya kita alokasikan untuk memenuhi keinginan yang belum tentu bermanfaat untuk kedepannya, kita tabung untuk kebutuhan yang selanjutnya, dan donasikan kepada yang lebih membutuhkan seperti tukang becak, tukang ojek, pedagang asongan dan lain-lain. Mengurangi belanja sama halnya kita mengurangi sampah, meskipun hanya beberapa persennya saja.

Pada dasarnya tantangan untuk tidak belanja di masa pandemi merupakan hal sulit. Apalagi saat ini banyak online shop yang rutin dalam memberikan penawaran khusus atau diskon. Tak heran jika tingkat konsumerisme masyarakat semakin hari semakin meningkat meskipun sedang masa pandemi Covid-19. Untuk mengurangi tingkat konsumerisme, maka perlu diperingati Hari Tanpa Belanja (Buy Nothing Day) dan serukan terkait bahaya konsumerisme pada publik.

Hari Tanpa Belanja adalah sebutan hari tidak resmi untuk melawan budaya konsumerisme yang memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk memberikan kesadaran pada publik agar lebih peka terhadap apa yang dibeli. Tak perlu kampanye, hanya satu hari libur belanja adalah sebuah penghormatan untuk Hari Tanpa Belanja ini. Meskipun hanya satu hari, setidaknya dapat mengingatkan masyarakat untuk tidak memikirkan belanja terus-menerus. □

**) Nur Khoffah, Mahasiswa PBSI FKIP UAD, Yogya.*

Kualitas Hidup Manusia Kembali Membah?

SELAMA dua bulan terakhir, dunia dihebohkan dengan isu krisis energi global. Krisis tidak hanya mengancam Inggris, negara-negara Uni Eropa, China, dan India, tetapi meluas hingga Amerika Serikat bahkan Singapura. Hal ini ditandai dengan melonjaknya harga sumber daya energi seperti batu bara, gas alam, dan minyak mentah. Kelangkaan dan kenaikan harga komoditas energi ini umumnya didorong oleh meningkatnya permintaan global. Seiring pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 yang tidak disertai ketersediaan pasokan komoditas yang memadai.

Apabila ditelisik lebih mendalam, krisis energi ini juga dapat berimbas bagi rantai pasokan global. Pemangkas produksi akibat pasokan listrik yang terhambat di negara produsen manufaktur seperti China dan beberapa negara Eropa dikhawatirkan akan mengganggu arus barang dan rantai pasokan secara global.

Pelajaran Indonesia

Krisis energi tampaknya mengirimkan pesan jelas, bahwa dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia. Pemerintah harus menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan dengan perencanaan yang komperhensif. Termasuk langkah-langkah antisipasi atas segala kemungkinan yang akan terjadi terjadi.

Salah satu *roadmap* kebijakan Pemerintah adalah pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Hal ini dipertegas dalam PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diturunkan dalam Perpres No 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Saat ini DPR tengah mempersiapkan regulasi khusus tentang EBT yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan yang sudah memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

Cepat atau lambat penggunaan energi

Freddy Tjekden

Seiring dengan menurunnya kasus-kasus covid-19 pada tahun 2021, kondisi kualitas hidup manusia menunjukkan terjadinya perbaikan. BPS dalam rilis datanya menyatakan, IPM DIY 2021 sebesar 80,22 (kategori sangat tinggi) atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 79,97 (kategori tinggi). Angka ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia telah kembali membaik bahkan lebih baik dari kondisi tahun 2019 sebesar 79,99 (kategori tinggi).

Peningkatan IPM ini terutama disebabkan meningkatnya pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang menjadi indikator dalam dimensi standar hidup layak. Rilis data BPS menyatakan bahwa pengeluaran riil per kapita disesuaikan pada 2021 DIY mencapai Rp 14,11 juta per tahun atau naik dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 14,02 juta per tahun. Seperti diketahui, pada 2020, indikator ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan 2019 sebesar Rp 14,39 juta per tahun. Akibatnya, nilai IPM secara keseluruhan juga mengalami penurunan walaupun pada saat yang sama indikator lain yang menyusun IPM mengalami peningkatan. Artinya indikator standar hidup layak yang menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan perbaikan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Pelanggaran

Perbaikan dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat tahun 2021 tidak terlepas dengan adanya pelanggaran dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sehingga, menurunnya kasus penyebaran covid-19 membuat ekonomi mulai tumbuh dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Rilis data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kumulatif sampai dengan triwulan III 2021 (c to c) sebesar 6,51% yang diikuti dengan pertum-

buhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,21%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat telah kembali membaik.

Semu a indikator lain yang menyusun IPM menurut dimensi umur panjang dan kesehatan serta dimensi pengetahuan tetap konsisten mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup (AHH) yang menjadi indikator dalam dimensi umur panjang dan kesehatan mengalami peningkatan dari 74,99 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,04 tahun pada tahun 2021. Artinya secara dimensi umur panjang dan kesehatan menunjukkan adanya perbaikan walaupun pada tahun ini, serangan pandemi covid-19 banyak menyebabkan kematian.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah program vaksinasi baik untuk covid-19 maupun vaksinasi terhadap penyakit yang lain. Disamping itu, revitalisasi berbagai fasilitas kesehatan serta terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan termasuk perbaikan pelayanan BPJS sangat berpengaruh dalam meningkatkan AHH di DIY.

Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang merupakan indikator penyusun IPM dimensi pengetahuan juga menunjukkan terjadinya perbaikan. Nilai HLS dan RLS DIY pada tahun 2021 masing-masing sebesar 15,64 (hampir sarjana) dan 9,64 (lebih dari SMP) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 masing-masing sebesar 15,59 dan 9,55. Perbaikan dalam dimensi pengetahuan ini tidak terlepas kesigapan pengelola pendidik-

an yang tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun secara daring. Sehingga tidak ada yang mengalami putus sekolah.

Dana BOS

Disamping itu, bantuan pendidikan dari pemerintah dalam bentuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang terus digelontorkan pemerintah menyebabkan pelayanan pendidikan semakin baik. Disamping adanya kartu Indonesia pintar (KIP) yang membantu masyarakat miskin untuk tetap bersekolah telah mampu meningkatkan dimensi pengetahuan masyarakat.

Kita berharap pandemi covid-19 segera berakhir, agar ekonomi bisa kembali menggeliat. Sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, perbaikan fasilitas dan pelayanan kesehatan serta pendidikan yang telah menjadi kebutuhan dasar manusia harus terus dilakukan. Semua dalam upaya memperbaiki kualitas hidup manusia. □

**) Freddy Tjekden, Fungsional Statistisi Muda BPS Kabupaten Kulonprogo*

Pojok KR

Hindari lonjakan kasus, perlu pengetatan libur Nataru

-- Pahami bila pandemi belum berlalu ***

KRMH Roy Rahajasa bisa menjadi jalan tengah

-- Kalau di tengah jalan, baru bahaya ***

Lembaga independen negara cenderung alami degradasi fungsi

-- Pengaruh politik dan kekuasaan, benar adanya

Berabs

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Rochto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Ahmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.